



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : PUSAT STANDARISASI INSTRUMEN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Rahmat Triyono
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 403377

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.400.000.000
1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	35.400.000
1. MOTOR, HONDA AIX12U21C08M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000		
2. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BEJ AT/SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	328.000.001
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	492.702.820
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.256.102.821
III. HUTANG	Rp.	1.118.438.279



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.137.664.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.